

ISSN : 1978-0362

**JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF**



Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF
Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Volume 9, Nomor 2, April 2015**

PENGELOLA JURNAL

Ketua Penyunting : Muryanti, MA
Sekretaris Penyunting : Puspo Reni Rahayu, S.Sos
Penyunting Pelaksana : Sulistyaningsih, M.Si,
Ahmad Zainal Arifin, P.Hd, Dr. Yayan Suryana,
Sekretariat : Beng Pramono, Arifiartiningih
Desain Sampul & Tata Letak : Kirman
Diterbitkan oleh : Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi : Laboratorium Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta
Telp (0274) 51957; Fax. (0274) 519571
Email: sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id dan
sosiologirefleksif@gmail.com

Sosiologi Reflektif adalah jurnal yang dikelola oleh Laboratorium Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Media ini menekankan kajian seputar persoalan-persoalan sosial. Redaksi juga menerima tulisan seputar dinamika sosial baik yang bersifat teoritis, kritik, reflektif, opini, dan berbagai ide-ide dinamika sosial kemasyarakatan. Tulisan minimal 20 halaman kuarto, spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia), catatan kaki, dan daftar pustaka. Penulis juga harus menyertakan nama lengkap bersama asal universitas atau lembaga profesional, alamat lengkap dan alamat email, nomor telepon, dan beberapa kalimat biografi penulis.

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF

DAFTAR ISI

Transmitting Charisma: Re-Reading Weber Through The Traditional Islamic Leader in Modern Java <i>Achmad Zainal Arifin</i>	1
Strategi Pengorganisasian Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dalam Pengelolaan Program HIV/AIDS <i>Henri Puteranto</i>	31
Respon Masyarakat Desa Sitimulyo terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan Bantul Yogyakarta <i>Sulistyaningsih</i>	49
Resistensi Petani terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo <i>Suliadi</i>	79
Identifikasi Rumah Tangga Rawan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Bantul-DI Yogyakarta <i>Nurhadi</i>	103
Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Yogyakarta Wilayah Yogyakarta 2000-2008 <i>Sri Roviana</i>	119
Sikap Penonton dalam Program Televisi Indonesia Saat Ini <i>Rahmat Edi Irawan</i>	139
Pengaruh Kepuasan Komunikasi terhadap Kinerja Pendidik IPDN Jatinangor <i>Yani Tri Wijayanti, Asep Suryana, Mien Hidayat, dan Funny Mustikasari</i>	155

Sosiologi Kaum Sufi: Sebuah Model Studi Integratif-Interkonektif <i>Dudung Abdurahman.</i>	175
Hegemoni Kriteria Estetik: Tinjauan Sosiologi Sastra atas Cerpen Pilihan Kompas dan Cerpen Kompas Pilihan <i>Adib Sofia.</i>	191
Pendidikan Damai: Upaya Mencegah Budaya Anarkisme Pendidikan <i>Muh. Syamsuddin.</i>	213
Islam dan Pekerjaan Sosial <i>Zulkipli Lessy.</i>	235
Pesantren dan Islam Indonesia: Kajian atas Pembaruan dan Peran Sosial Transformatif <i>Achmad Maulani.</i>	253
Aksi Kolektif dalam Bersepeda: Studi Banding Atas Sego Segawe (Sepeda Kanggo Sekolah Lan Nyambut Gawe) dan JLFR (Jogja Last Friday Ride) di Kota Yogyakarta <i>Mohamad Jamal Thorik.</i>	281
Dibalik Kekuatan Ideologi dan Kepentingan <i>Hendris.</i>	309

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr.wb.

Dinamika permasalahan umat Islam teramat luas dan menarik untuk dikaji, terkait dengan kelembagaan Islam yang masih eksis selama ini. Peran berbagai macam lembaga tersebut nampak dari upaya yang dilakukannya dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial yang muncul saat ini, misalnya adanya permasalahan AIDS, kepemimpinan dalam konteks kekinian, isu kekerasan yang muncul dalam sistem pendidikan dan lainnya. Permasalahan tersebut akan dibahas di beberapa artikel Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 9 Nomor 2, April 2015.

Achmad Zainal Arifin menulis tentang *Transmitting Charisma: Re-reading Weber through the Traditional Islamic Leader in Modern Java*. Artikel ini mencoba untuk menelaah kembali pandangan seorang tokoh klasik sosiologi, Max Weber, berkenaan dengan teori kepemimpinan beliau, lebih khusus lagi pandangan tentang karisma. Dalam hal ini, Weber berpandangan bahwa proses modernisasi, khususnya proses rasionalisasi yang tidak lagi bisa dibendung pengaruhnya, akan menyebabkan otoritas kharismatik akan berubah, terutama ke arah model legal-rasional. Keyakinan bahwa kualitas kharismatis, yang biasanya direpresentasikan oleh kekuatan supranatural, yang dalam pandangan Weber akan tererosi oleh proses modernisasi, justru semakin terinstitusionalisasi dalam dunia pesantren dan bahkan diyakini bisa ditransmisikan melalui institusi-institusi yang ada.

Henri Puteranto menganalisis tentang Strategi Pengorganisasian Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dalam Pengelolaan Program HIV/AIDS. Penulis menjelaskan problematika pengelolaan program HIV/AIDS muncul ketika suatu organisasi sosial keagamaan menjalankan program ini. Organisasi keagamaan dituntut untuk mampu menjalankan program secara efektif. Namun demikian, dalam

implementasinya akan berhadapan dengan “*body of knowledge*” dari program HIV/AIDS. Menurutnya Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan mampu menjawab isu-isu sensitif di program HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, membangun legitimasi organisasi dan mengelola manajemen pengetahuan secara efektif.

Artikel Respon Masyarakat Desa Sitimulyo Terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan Bantul Yogyakarta ditulis oleh Sulistyaningsih. Penulis menjelaskan bahwa persoalan sampah, terutama persoalan sampah rumah tangga merupakan persoalan penting yang harus segera disikapi secara bijak. Selama ini pengelolaan sampah rumah dilakukan dengan *system sanitary landfill* yaitu sampah harus diolah, dipadatkan dan ditimbun setiap hari. Hal ini sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: *Pertama*, Pengelolaan TPA Piyungan yang berlokasi di Desa Sitimulyo sejak tahun 1995 sampai sekarang telah menimbulkan respon yang bervariasi dari masyarakat Desa Sitimulyo. Ada masyarakat yang merespon pro (setuju) terhadap pengelolaan TPA tersebut, namun ada juga yang kontra (tidak setuju) terhadap TPA. Perbedaan respon yang ada disebabkan karena ada masyarakat yang diuntungkan dan dirugikan adanya TPA di Desa Sitimulyo. *Kedua*, Kebijakan pemerintah Desa Sitimulyo terhadap pengelolaan TPA di Desa Sitimulyo lebih mengikuti aspirasi masyarakat.

Suliadi menulis Resistensi Petani Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo. Tulisan ini menjelaskan perubahan sikap politik petani dalam menanggapi ekspansi kapitalisme pertambangan tidak lebih sebagai kompromi politik petani dalam merespon ekspansi tersebut. Menurutnya apa yang sesungguhnya hendak ditolak adalah cara-cara yang ditempuh para pemodal/perusahaan dan negara dalam melakukan ekspansi yang bias kapitalis yang hanya menciptakan masyarakat petani menjadi tersingkir terhadap akses sumber daya yang ada.

Nurhadi menulis artikel tentang Identifikasi Rumah Tangga Rawan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Bantul-Di Yogyakarta. Faktanya, terdapat perbedaan daya tahan menyebabkan adanya perbedaan dampak bagi setiap rumah tangga yang mengalami bencana. Dampak bencana di daerah rawan bencana Bantul dapat dikategorikan sebagai berikut : (1) orang yang paling kaya menderita

paling sedikit bencana karena kemampuannya mengurangi dampak bencana dengan memperkuat rumahnya dan menggunakan asset yang dimilikinya, (2) penderitaan yang dialami, menjadikan orang miskin mampu mengurangi dampak dari kejadian bencana di masa depan untuk keberlangsungan hidupnya dengan memaksimalkan modal social sehingga meminimalkan biaya untuk membangun rumah dan (3) kelompok bertahan hidup yang paling rentan terhadap peristiwa bencana karena kekayaannya sudah habis untuk biaya rekonstruksi dan ketidakmampuannya mengurangi biaya buruh.

Sri Roviana menguraikan tentang proses Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Yogyakarta Wilayah Yogyakarta 2000-2008. Penulis mejelkaskan bahwa perempuan Indonesia termarginalkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Berbagai macam organisasi perempuan menyadari pentingnya pendidikan politik bagi perempuan, salah satunya organisasi KPI. Penulis menyimpulkan terhadap program yang dijalankan oleh KPI selama ini menunjukkan bahwa KPI Yogyakarta merupakan embrio dari gerakan sosial baru, akan tetapi pertumbuhan gerakan ini perlu menyingkirkan kelemahan yang muncul di tengah jalan: kesulitan membangun ideologi bersama, representasi politik yang ditunjukkan oleh organisasi elit, tidak adanya konsolidasi yang berbasiskan organisasi, ketergantungan kepada donor dan ketidakmandirian dan pembiayaan sukarela untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan.

Rahmat Edi Irawan menulis artikel tentang Sikap Penonton dalam Program Televisi Indonesia Saat Ini. Menurutnya saat ini mulai terjadinya pergeseran penonton pasif ke penonton aktif di industri televisi Indonesia. Jika pada masa lalu, banyaknya hambatan, seperti rezim pemerintahan yang represif, tidak adanya pilihan program dan stasiun televisi serta belum adanya regulasi dan regulator menyebabkan lamanya penonton televisi di Indonesia bersikap pasif. Sementara saat ini, pemberdayaan penonton melalui berbagai media dan upaya yang dilakukan KPI menyebabkan kondisinya sudah berubah, penonton mulai aktif bersikap. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatkan sikap kritis mereka, dengan banyaknya melakukan pengaduan atas tayangan yang melanggar regulasi baik melalui KPI atau media massa lainnya.

Yani Tri Wijayanti, Asep Suryana, Mien Hidayat, Dan Funny Mustikasari menganalisis tentang Pengaruh Kepuasan Komunikasi terhadap Kinerja Pendidik IPDN Jatinangor. Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi organisasi berpengaruh pada efektivitas

organisasi, salah satunya terkait kinerja. Terpenuhinya kebutuhan informasi dan komunikasi di dalam organisasi menimbulkan kepuasan komunikasi yang dapat meningkatkan kinerja dari karyawan, dalam tulisan ini adalah pendidik di IPDN Jatinangor. Ketika interaksi sosial yang meliputi kontak sosial dan komunikasi dalam organisasi berjalan dengan baik, maka hubungan antar anggota organisasi terkait dengan pekerjaan akan berjalan dengan baik, dan kinerja para anggota organisasi dapat meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Sosiologi Kaum Sufi: Sebuah Model Studi Integratif-Interkonektif ditulis oleh Dudung Abdurahman. Penulis menjelaskan Kaum Sufi merupakan realitas sosial yang berbasiskan keagamaan pada komunitas-komunitas tarekat. Tarekat sendiri adalah salah satu bentuk implementasi keislaman yang bercorak esoterik, yang secara sosiologis biasa menampilkan aktivitasnya yang terstruktur dalam kelompok guru dan murid. Hubungan antara keduanya terjalin dalam sistem sosial yang konsisten terhadap moralitas dan spiritualitas masyarakat. Karena itu dinamika sosial Kaum Sufi dalam gerakan-gerakan tarekat itu selalu bercirikan : *pertama*, pengembangan doktrin sufi melalui sistem ritual berfungsi memperkuat solidaritas sosial para penganut tarekat. *Kedua*, peranan Kaum Sufi dalam bentuk hubungan dan partisipasi sosial di tengah kemajemukan masyarakat pada umumnya menampilkan model gerakan sosial yang unik, khususnya sumbangan mereka terhadap pembinaan spiritual dan moralitas publik di tengah-tengah perubahan sosial. *Ketiga*, tipologi gerakan sosial Kaum Sufi pada umumnya bersifat *inklusifme-pragmatis; eksklusifme-fundamentalis; dan fundamentalisme-pragmatis*.

Adib Sofia menulis artikel yang berjudul Hegemoni Kriteria Estetik: Tinjauan Sosiologi Sastra atas *Cerpen Pilihan Kompas* dan *Cerpen Kompas Pilihan*. Hegemoni merupakan konsep yang dikenalkan Gramsci untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik politik, budaya dan ideologi. Pendekatan mendasarnya adanya hubungan yang kompleks dan non mekanik antara budaya dan politik. Gramsci mempertanyakan bentuk kebudayaan manakah yang menjadi budaya massa yang diproduksi kontemporer. *Cerpen Kompas Pilihan* (Cerita Pendek Pilihan *Kompas*) dan *Cerpen Pilihan Kompas* (Cerita Pendek Pilihan *Kompas*) merupakan kumpulan cerita pendek terbaik yang dimuat di harian *Kompas*, salah satu penerbit terkemuka. Mereka mempublikasikan secara periodik sejak tahun 1970 dan menjadi salah satu produk dari masyarakat.

Muh. Syamsuddin menjelaskan tentang Pendidikan Damai:

sebagai Upaya Mencegah Budaya Anarkisme Pendidikan. Penulis menegaskan bahwa kekerasan merupakan bentuk hegemonik dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum dan budaya. Termasuk dalam pendidikan dilakukan melalui proses dehumanisasi dari substansi dan metode pembelajaran. Metode pengajaran yang berlangsung selama ini dilakukan dengan pendekatan pedagogi atau seorang guru, menjadi figur yang sempurna (mengetahui tentang banyak hal) dan siswa hanyalah obyek. Tindakan ini disebut kekerasan pendidikan. Kekerasan ini dapat merusak kepribadian.

Islam dan Pekerjaan Sosial dianalisis oleh Zulkipli Lessy. Menurut Teologi Islam dan lima pilar Islam memiliki sejarah dan peran penting dalam pengembangan praktik pekerjaan sosial dan masyarakat Muslim. Beberapa efeknya dikaji dengan menggunakan review literatur dan melalui komparasi diantara masyarakat Muslim dan beberapa kelompok agama yang mengikutinya serta menguji teologi Muslim Shi'i dan Muslim Sunni. Konsep utama dari Islam, misalnya : syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji seharusnya dijalankan oleh pekerja sosial Muslim dalam praktiknya dalam masyarakat Muslim.

Achmad Maulani menulis tentang Pesantren dan Islam Indonesia: Kajian atas Pembaruan dan Peran Sosial Transformatif. Penulis menegaskan Pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) dipahami sebagai pelopor utama Islam di Indonesia. Bukan hanya karena kelembagaan tradisionalnya sebagai rujukan dalam Islam, akan tetapi karena pengembangan pendidikan Islam yang menonjol serta pengembangan wacana keislaman. Perkembangannya akhir-akhir ini, kedua lembaga tersebut berkontribusi penting dalam membangun dialog antara nilai islam dan budaya lokal.

Artikel terakhir dalam kajian jurnal ini ditulis oleh Mohamad Jamal Thorik dalam tugas akhirnya yang berjudul Aksi Kolektif dalam Bersepeda: Studi Banding atas Sego Segawe (*Sepeda Kanggo Sekolah Lan Nyambut Gawe*) dan JLFR (*Jogja Last Friday Ride*) di Kota Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan perbedaan antara Sego Segawe dan JLFR pada pola sosialisasi yang dibagi menjadi 5 mekanisme sosialisasi : 1) imitasi: Sego Segawe menggunakan keteladanan Walikota dan Pegawai Balaikota, sedangkan JLFR menggunakan keteladanan komunitas sepeda; 2) instruksi: Sego Segawe menggunakan Surat Edaran (SE) sebagai himbauan bersepeda, namun aspek instruksi tidak terdapat pada JLFR; 3) desiminasi: Sego Segawe kurang memaksimalkan sarana komunikasi, sementara JLFR menggunakan sarana *social media* dengan

intens; 4) motivasi: Sego Segawe menunjukkan dukungan melalui *reward* kepada pelajar sebagai duta sepeda, sedangkan JLFR menggalang dana untuk pesepeda korban kecelakaan; 5) penataran, Sego Segawe mengalami inkonsistensi pada pelaksanaan kampanye secara parsial, sedangkan JLFR melaksanakan kampanye secara rutin.

Demikian gambaran secara umum jurnal yang akan sidang pembaca nikmati edisi ini. Semoga apa yang tertuang dalam kajian ini memberikan sumbangan yang berarti dan menjadi sumber pengetahuan baru. Selamat membaca. *Wallahu a'lam bi shawab.*

Wassalamualaikum wr. wb

Redaksi

STRATEGI PENGORGANISASIAN LEMBAGA KESEHATAN NAHDLATUL ULAMA (LKNU) DALAM PENGELOLAAN PROGRAM HIV/AIDS

Henri Puteranto

Project Manager, Decentralized M&E family Planning Project, The Center of Health Policy and Management Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada
Alamat Email: hputeranto@gmail.com

Abstract

Some problems could arise when religious social organizations run the program of managing HIV/AIDS. Religious organizations are required to run the program effectively. However, the implementation of the program sometime is not easy since they have to faced the "body of knowledge" of managing the HIV/AIDS programs. Therefore, the ability of the religious organization to undertake this program is crucial. Religious organizations have a role to preserve the significance of religious values, and at the same time, to avoid conflict with the strategies possessed in HIV programs. This study explores three issues in the clinic institutions of the Nahdlatul Ulama: the interaction of values and norms, efforts to establish the organization legitimacy, and the ability to perform knowledge management. Qualitative research methods is used to explore these three issues. The study results showed that the clinic institution of the Nahdlatul Ulama as a socio-religious organization is able to answer sensitive issues in HIV/AIDS programs to reduce stigma and discrimination, building the organizational legitimacy and conducting the knowledge management effectively.

Key Words: HIV/AIDS, Knowledge Management, Legitimation, and the Nahdlatul Ulama

Intisari

Problematika pengelolaan program HIV/AIDS muncul ketika suatu organisasi sosial keagamaan menjalankan program ini. Organisasi keagamaan dituntut untuk mampu menjalankan

program secara efektif. Namun demikian, dalam implementasinya akan berhadapan dengan “body of knowledge” dari program HIV/AIDS. Oleh karenanya, kemampuan organisasi untuk melakukan merespon program HIV/AIDS menjadi suatu hal yang krusial. Organisasi keagamaan memiliki peran untuk tetap memegang nilai keagamaan namun tidak bertentangan dengan strategi yang dimiliki oleh program HIV. Penelitian mengeksplorasi tiga hal dalam Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Tiga hal tersebut adalah interaksi nilai dan norma, upaya membangun legitimasi organisasi, dan kemampuan organisasi melakukan manajemen pengetahuan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi ketiga topik permasalahan tersebut. Hasil dari studi menunjukkan bahwa Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan mampu menjawab isu-isu sensitif di program HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, membangun legitimasi organisasi dan mengelola manajemen pengetahuan secara efektif.

Kata Kunci: HIV/AIDS; Manajemen Pengetahuan, Legitimasi; Nahdlatul Ulama, dan Nilai-nilai

Pendahuluan

Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) merupakan salah satu lembaga di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Nahdlatul Ulama (NU) sendiri merupakan salah satu dari organisasi besar Islam di Indonesia. Berdiri sebagai sebuah lembaga sejak tahun 1926, sedangkan LKNU berdiri pada tahun 2004 sebagai lembaga internal yang baru di dalam PBNU. LKNU mempunyai tanggung jawab menjalankan kebijakan PBNU di bidang kesehatan dan melaksanakan fungsi pembinaan LKNU di tingkat pengurus wilayah. Pada tahun 2010, LKNU menjadi salah satu penerima program dari *Global Fund* (GF) untuk penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) untuk kurun waktu 5 tahun.

LKNU sebagai sebuah organisasi memiliki nilai-nilai, norma, dan peran yang disebut struktur normatif. Program HIV/AIDS memiliki isu-isu sensitif, seperti stigma dan diskriminasi, isu kondom, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), pemberian jarum steril dan rehabilitasi pada pengguna napza suntik (penasun). Sehingga terjadi proses interaksi

terhadap nilai yang ada dan nilai yang melekat pada program yang dikelola. LKNU sebagai organisasi berbasis religi, otomatis membawa nilai-nilai religi yang menjadi keyakinannya. Di sisi lain, program HIV memiliki strategi program yang praktis bertujuan jangka pendek untuk mengurangi penularan penyakit. Strategi program yang praktis, seperti pemberian kondom, pemberian jarum suntik steril, rujukan tes HIV, dan rujukan tes infeksi menular seksual (IMS). Terjadilah situasi problematis antara LKNU dan program HIV, dimana pengetahuan yang dimiliki oleh LKNU dalam bidang religi harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan program HIV. Pesan religi atau agama melarang kegiatan asusila, namun LKNU harus memasuki area intervensi program HIV yang dianggap berhubungan dengan kegiatan asusila seperti pemberian kondom dan pemberian jarum suntik steril.

Problematika ini mendorong LKNU untuk merespon secara baik aspek interaksi nilai dan norma, membangun legitimasi organisasi yang memadai, serta mengembangkan manajemen pengetahuan yang efektif guna merespon keterbatasannya sebagai organisasi berbasis religi. Perkembangan pengetahuan dan strategi dalam program HIV/AIDS harus mampu direspon secara baik oleh LKNU, sehingga menjadi organisasi yang memiliki kemampuan tinggi, mencapai kinerja tinggi, dan keunggulan kompetitif. Studi kualitatif akan mengeksplorasi bagaimana organisasi berbasis religi melakukan respon program HIV yang berkaitan erat dengan isu stigma dan diskriminasi, dengan cara membangun legitimasi organisasi dalam pelaksanaan program dan mengembangkan manajemen pengetahuan yang efektif guna memperkuat pengorganisasian organisasi LKNU.

Struktur Organisasi

Berbicara mengenai kelompok atau komunitas keagamaan maka akan menemui tiga organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tiga organisasi tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah yang merupakan representasi keanekaragaman kelompok keagamaan khusus untuk muslim. NU sering dikategorikan oleh banyak ahli sebagai tradisional, sedangkan Muhammadiyah sebagai modernis. Muhammadiyah juga sering disebut sebagai puritan, terlebih setelah mengadopsi pandangan-pandangan teologis *Wahhabisme* dengan agenda purifikasi pemurnian Islam dari unsur-unsur mistik yang disebut dengan istilah "TBC" (*Takhayul, Bid'ah, dan Churafat*). K.H Hasyim Asy'ari pendiri NU menggariskan batasan

termonologi ASWAJA sebagai pengikut salah satu dari empat imam mazhab *fiqh* (pijakan hukum), yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Keakraban masyarakat NU dengan pola bermazhab Syafi'iyah yang dikenal sebagai imam moderat, menjadikan pola pikir masyarakat NU bersikap akomodatif. Golongan tradisi ini seperti yang disampaikan Ali Haidar, berpikir melalui logika sebab akibat dan keterikatannya dengan imam mazhab mendorong untuk menggunakan metode analogis yang melahirkan pola pikir NU yang luwes dan elastic.¹

Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 oleh K.H Ahmad Dahlan dengan konsentrasi pergerakan mendirikan masjid, sekolah tempat peribadatan, klinik kesehatan, rumah yatim piatu, persatuan buruh pabrik, penerbit buku, majalah, surat kabar, dan institusi kesejahteraan sosial. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam di Indonesia lahir atas dorongan kondisi-kondisi dan situasi yang mengitari dunia Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 yang mencakup antara lain kondisi sosial-politik, kultural, dan keagamaan.²

Program HIV/AIDS memiliki cetak biru (*blue print*) yang dibangun dalam konteks pendekatan kesehatan/medis dan diadaptasi dari pengalaman program dari berbagai negara di dunia. Namun perlu untuk diteliti apakah bisa menimbulkan konsekuensi tidak diinginkan berkaitan dengan nilai-nilai yang dibawanya. Menggunakan serta merta cetak biru tanpa melihat konteks sosio-budaya dan kultural dari organisasi dan juga masyarakat disebut *institutional monocropping*. Hal ini terjadi karena cetak biru ini dianggap cara terbaik yang pernah dilakukan negara maju. Proses institutinalisasi seperti nilai-nilai dan norma tidak begitu saja diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat sendiri memiliki modal budaya, keterampilan lokal yang bisa dimanfaatkan dalam proses institutinalisasi.³

Peran Masyarakat Sipil dalam Kerangka Model Program Penanggulangan HIV/AIDS

Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan epidemi

1 Ridwan, *Paradigma Politik NU, Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar;2004)

2 Syarif Hidayatullah, *Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2010)

3 Alejandro Portes, *Institutions and Development: A Conceptual Reanalysis*, *Population and Development Review* 32 (2), 2006, hlm 241-245.

yang berkembang paling cepat.⁴ Thailand dan Myanmar cenderung turun dan stabil kecuali Indonesia yang justru naik.⁵ Kemenkes memperkirakan, Indonesia pada tahun 2014 akan mempunyai hampir tiga kali jumlah orang yang hidup dengan HIV dan AIDS dibandingkan pada tahun 2008 (dari 277.700 orang menjadi 813.720 orang). Program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia salah satu penyelenggaranya adalah masyarakat sipil (*civil society*). Masyarakat sipil dalam konteks program HIV/AIDS berperan mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan. Kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir antara lain adalah orang yang terinfeksi HIV dan populasi kunci, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga kemasyarakatan, tenaga profesional, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan tinggi. Mereka dapat menjadi penggerak utama dan berperan aktif dalam upaya penanggulangan AIDS di Indonesia, dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan dan implementasi setiap program yang dilakukan serta monitoring dan evaluasi.⁶

Dalam memecahkan masalah di komunitas terdapat tiga pendekatan, yaitu layanan (*service*), advokasi (*advocacy*), dan mobilisasi (*mobilizing*). Layanan berfokus pada individu, satu kali waktu, dan tidak komprehensif. Advokasi fokus pada individu atau kelompok, dapat memberikan efek perubahan pada organisasi atau lembaga. Sedangkan mobilisasi, melibatkan warga komunitas untuk melakukan aksi langsung. Dalam melakukan mobilisasi *community based organization* (CBO), memiliki 2 model pendekatan. Model pendekatan tersebut adalah kampanye aksi sosial (*social action campaigns*) dan model pengembangan (*The development model*). Kampanye aksi sosial, dilakukan oleh CBO dengan tujuan untuk merubah keputusan, struktur societal (masyarakat), dan budaya.⁷

Penggunaan konsep *multi-organizational field*, dalam gerakan sosial. Pihak sekutu dan pihak yang netral adalah sebagai target dari kerangka gerakan sosial yang sejajar "*frame alignment processes*" dan pada pihak yang bertentangan dimasukkan dalam kerangka gerakan sosial yang berlawanan "*counter-framing*". Pemetaan yang jelas terhadap berbagai pihak dalam gerakan sosial menjadi pintu penting untuk mencapai

4 UNAIDS, *Global Report: Report on the global AIDS epidemic 2008*.

5 World Health Organization (WHO). (2012). *HIV-AIDS in the South-East Asia Region, Progress Toward MDGs 6A*, 2012.

6 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), *Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014*, Jakarta, 2010

7 Gary Paul Green & Anna Haines. *Asset Building & Community Development*. Sage Publications, Inc, 2002.

keberhasilan gerakan. Kelompok yang dikategorikan sebagai pihak yang sama, berlawanan atau netral bisa dijadikan sekutu dalam perjuangan gerakan sosial. Namun demikian perlu untuk diteliti kembali terkait dengan pihak yang berlawanan, berkait dengan jaringan sosial yang mereka miliki, seperti jenis pekerjaan, tempat tinggal, dan pengalaman hidup yang dimiliki.⁸

Membangun Legitimasi Kelembagaan

Legitimasi merupakan isu yang penting dalam konteks organisasi seperti LSM atau organisasi masyarakat sipil pada umumnya. Legitimasi dalam banyak studi lebih menekankan pada aspek akuntabilitas, keterwakilan dan kinerja dari sebuah organisasi. Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya bahwa aspek legitimasi adalah terpenuhinya legalitas hukum, konsisten antara visi dan kegiatan yang dilakukan, keterwakilan, hasil kinerja/ performan. Wacana ini menjadi terlalu teknis bila bicara apakah sebuah organisasi bisa dikatakan memiliki legitimasi atau tidak berdasar dari hal di atas karena pembicaraan dalam ranah studi ilmu-ilmu sosial yang lebih luas, bahwa legitimasi perlu dikaitkan sebagai sebuah konstruksi sosial.⁹

Legitimasi adalah persepsi umum atau asumsi bahwa tindakan dan entitas yang diinginkan, tepat, atau sesuai dengan konstruksi sosial yang berada dalam sistem norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan. Legitimasi dengan menggunakan konsep yang lebih luas ini membantu dalam analisis legitimasi dengan berpijak pada pendekatan Teori Institusi. Studi ini dalam kajian ilmu sosial, cenderung hilang dan tidak menjadi wilayah studi-studi pembangunan. Literatur yang berkaitan dengan Teori Institusi dan beberapa studi terkini yang dilakukan, menjelaskan terdapat tiga hal aspek dalam legitimasi. Tiga aspek tersebut yaitu pentingnya legitimasi lingkungan (*the legitimating environment*); legitimasi multisegi (*the mulfaceted nature of legitimacy*); legitimasi melalui identifikasi simbol-simbol (*the legitimacy through identification with symbols*). Legitimasi lingkungan (*the legitimating environment*), sumber penjelasan dari aspek legitimasi tersebut mendasarkan pada teori Institusi. Menekankan bahwa legitimasi organisasi bersumber pada legitimasi dari lingkungannya. Lingkungan organisasi tidak tunggal,

8 John H. Evan, *Multi-organizational Field and Social Movement Organization Frame Content: The Religious Pro-Choice movement*. Sociological Inquiry, 1997

9 Sarah Lister., *NGO Legitimacy: Technical Issue or Social Construct?, Critique of Antropology*, 2003, hlm. 178.

lingkungan bukan berarti lingkungan alam.

Jaringan Sosial dan Manajemen Pengetahuan

Lazarfeld mendefinisikan *opinions leader* adalah "Individu-individu dalam masyarakat yang menjadi pemberi informasi melalui beragam media dan interaksi, kemudian membentuk opini-opini serta menyampaikan informasi dan mempengaruhi individu-individu lain yang kurang mendapat informasi secara langsung".¹⁰ Jalur informasi dan sumber informasi, serta siapa yang menjadi pemberi informasi menjadi hal yang penting dalam diskusi mengenai organisasi. Namun demikian informasi atau data tidak cukup, butuh pengetahuan yang memadai. Pengetahuan yang mampu dikelola secara efektif akan memberikan posisi kuat organisasi mempertahankan nilai-nilai lembaga.¹¹ Pengetahuan yang kemudian dikelola secara efektif akan mampu membawa organisasi beda dengan organisasi lain, kuat secara kultur dengan nilai-nilai yang melekat selama ini dan akan eksis kedepannya. Manajemen pengetahuan sendiri adalah sebuah kegiatan pengorganisasian pengetahuan yang berupa pengembangan, tranfer, penyebaran, penyimpanan serta penggunaan pengetahuan, juga menyediakan kepada anggota organisasi berbagai pengetahuan yang substansi untuk melakukan tanggapan dan membuat keputusan secara tepat guna mencapai tujuan organisasi.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Lembaga Kesehatan NU (LKNU)

NU lahir pada 31 Januari 1926 didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari dengan basis masa 45 juta orang. Massa pendukung NU berasal dari masyarakat santri di pedesaan, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Salah satu karakteristik mereka adalah cenderung menghindari konflik dan lebih mementingkan harmoni; dan sebagai komunitas santri, karakteristik berikutnya adalah ketaatan mereka kepada ulama atau kyai dalam suatu pola hubungan guru-murid yang nyaris sakral. Sikap hormat dan kepatuhan mutlak kepada kyai sebagai guru bukanlah manifestasi penyerahan total kepada guru yang dianggap memiliki otoritas, melainkan karena keyakinan bahwa guru adalah penyalur kemurahan Tuhan yang dilimpahkan kepada murid-muridnya.¹²

10 O Matthew Jackson, *Social and Economic Network*. Princeton University Press, 2008

11 *Ibid*, 2008

12 Abdul Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan politisasi Islam Indonesia*,

NU disebut sebagai *Jam'iyah Diniyah Islamiyah* yaitu organisasi sosial keagamaan dengan tujuan melaksanakan ajaran *Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah* dengan mengikuti salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. Para kyai dalam prakteknya menganut paham kuat Imam Syafii. Kelahiran NU dari berbagai literatur menunjukkan warna yang sama, yakni sebagai reaksi atas perkembangan modernisme Islam, yang tarik-menarik antara perkembangan politik di Timur Tengah dengan dinamika gerakan Islam di tanah air. Reaksi di maksud merupakan sikap protes dari tokoh-tokoh Islam yang menyatakan diri sebagai penganut *Ahlu Sunnah Wal Jamaah*, dimana akar-akar reaksi itu berdimensi ideologis-kultural.¹³ NU juga dibangun dengan empat prinsip nilai, yaitu: *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawassun* (harmoni), dan *i'tidal* (konsisten). Keempat prinsip ini menghargai isu kemanusiaan. Dengan demikian, NU sebagai organisasi masa (ormas) sosial keagamaan telah memiliki garis perjuangan yang cukup lengkap untuk menjalankan tugas atau berkhidmat kepada negara atau bangsa dan umat. Garis perjuangan di atas merupakan petunjuk NU untuk merespon persoalan-persoalan kekinian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik persoalan keagamaan, sosial-ekonomi, kesehatan atau pun yang lainnya.¹⁴

NU dan HIV: Interaksi Nilai dan Norma

Di dalam konteks agama kadang berpikir pada tataran ideal, seharusnya yang dilakukan. Bila tidak melakukan perbuatan dan amalan yang benar maka akan mendapat dosa atau sebaliknya bila mengikuti ajaran yang sesuai akan mendapat pahala. Isu HIV sendiri menyangkut dua hal utama, yaitu penularan HIV pada kegiatan seksual dan penularan HIV melalui penggunaan napza yang dipakai dengan cara suntikan. Seorang informan BW, menyatakan:

“Ada pergulatan dalam sistem nilai internal di NU. NU sebagai sebagai FBO (*Faith Based Organization* / organisasi berbasis agama) sudah jelas *Rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh umat manusia), namun bertemu isu HIV-AIDS... naah perlu kajian-kajian yang lebih mendalam. Nah ini menurut saya pergulatannya

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LKIS,1995)

13 Laode Ida, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*.(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)

14 LKNU.(2013). *Panduan Penanggulangan AIDS Perspektif Nahdlatul Ulama*, Jakarta:PPKLNNU,2013)

di sistem nilainya. Yaitu bagaimana membumikan nilai-nilai islam dikonteks isu HIV yang banyak terkait stigma dan diskriminasi”.

Keberagaman terhadap respon terhadap isu HIV menjadi terasa, ketika ditanya mengenai isu sensitif dalam program HIV seperti kondom kepada EN.

“Kenapa sih LK bagi-bagi kondom, ya tapi kan mereka ga paham tujuan dari bagi-bagi kondom itu untuk apa, banyak orang-orang yang memang belum paham tujuannya”.

Informan menyampaikan pendapatnya ketika pertama kali menjadi salah seorang staf. Informan juga menyampaikan bahwa tidak ada masalah yang terjadi untuk dirinya pribadi setelah tahu mengenai program HIV ini. Informan mendorong LK untuk melakukan sosialisasi terus menerus kepada orang-orang di NU dari segala kalangan. NU sendiri seperti yang disampaikan oleh seorang informan yang merupakan staf advokasi di PRNU. Memandang bahwa isu HIV seperti kondom, isu lokalisasi lebih sensitif. Pergulatan mengenai nilai kondom untuk kegiatan seks berisiko menjadi sangat sensitif. Informan menjelaskan mengenai pemahaman terhadap kondom yang bisa saja ditolak oleh kalangan NU bila penjelasan mengenai faedah kondom tidak jelas dan lengkap. Cara menyampaikan juga menjadi suatu yang substansial, yakni mulai dari penjelasan bagian mana dahulu dari isu kondom perlu dijelaskan. UD menyampaikan:

“Kalau saya masuk pakai isu kondom, itu agak kontra produktif, kenapa pemahaman masyarakat kita yang umumnya itu kondom masih alat untuk seks bebas dan segala macam. Belum banyak yang memahami bahwa kondom itu salah satu alat kontrasepsi. Ini yang sudah terlanjur luas di masyarakat, nah menghadapi tantangan ini kalau saya lebih suka masuk dulu ke isu ibu rumah tangga (penularan HIV pada ibu rumah tangga). Sebetulnya bukan penolakannya karena mereka belum paham sampai pada level bahwa kondom itu juga adalah alat kontrasepsi”.

Kondom dalam diskusi bisa menjadi isu yang bertentangan dengan pemahaman nilai dan norma yang dimiliki oleh NU, namun demikian juga bisa berada pada sisi pemahaman yang lebih longgar karena aspek kemanfaatannya untuk masyarakat. Interaksi nilai NU dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh program HIV sendiri bisa tarik ulur

dengan memperhatikan konteks masing-masing. Dapat dipahami bahwa pemahaman atas nilai dari anggota NU dan NU secara kelembagaan begitu heterogen.

Legitimasi Kelembagaan NU

Legitimasi kelembagaan NU ditinjau dari aspek lingkungan eskternal NU. Disadari bahwa sebetulnya NU telah terlibat dalam berbagai aktivitas program HIV sejak sekitar tahun 1997. Kegiatan awal berupa pengembangan buku pedoman Khotbah Jum'at serta adanya Bahtsul Masa'il pertama untuk menghadirkan fatwa-fatwa kyai mengenai isu HIV namun kegiatan ini tidak dilakukan secara intensif. Para aktivis di NU pun juga sebetulnya sudah terlibat di berbagai kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV. Namun demikian tantangan yang nyata adalah tatkala NU harus berhadapan dengan program yang besar dan dengan melibatkan seluruh komponen NU untuk terlibat di dalamnya. Salah seorang informan kunci AG yang menjadi pejabat di PRNU mengatakan:

“Sewaktu proposal, presentasi, dan sudah dinobatkan sebagai PR, penolakan itu banyak. Baik dari dalam dan luar. Dari luar khususnya dari populasi kunci, karena khawatir NU dikenal kolot, kalau belum pernah masuk ke NU pastinya terkenal kolot, dan penolakannya itu bukan hanya isu, benar”.

Pengajuan proposal kepada GF dalam mekanisme di Indonesia harus melalui *Country Coordination Mechanism* (CCM). Sesuai dengan jadwal pengajuan proposal negara kepada GF, pihak CCM kemudian memilih para calon PR di masing-masing komponen AIDS, TB, dan Malaria. Selanjutnya oleh CCM para calon akan diusulkan kepada GF dan dilakukan asesmen oleh GF terkait dengan kemampuan mengelola dana, program, serta kekuatan sistem monitoring dan evaluasi lembaga.

Informan yang berinisial NA yang merupakan mantan anggota CCM, menyatakan bahwa NU mengajukan kesediaan sebagai PR dalam program HIV GF ronde 9 kepada CCM setelah proposal GF sudah selesai dikembangkan oleh GF, sehingga dalam proses awal sama sekali tidak terlibat. Mengandung pesan bahwa peran dari NU belum tampak selama proses awal proposal. Menjadikan awal yang berat untuk membangun legitimasi menjadi PR. Informan NA yang pernah menjadi perwakilan CCM menyampaikan:

“Batas mengajukan proposal itu April 2009, berarti dari Oktober 2008 udah jalan proses pembuatan konsep, analisa, dan sebagainya. NU tidak terlibat dari situ, sehingga saat mereka mendapat mandat program, di awal seakan-akan tidak menemukan arah”.

Setelah dinobatkan sebagai salah satu PR masih banyak pula pendapat yang mempertanyakan kemampuan NU. Dari dalam NU pada saat awal persiapan proposal program pun juga beredar situasi dimana keraguan untuk melakukan kegiatan sebagai pengelola dana hibah GF. Salah satu sisi menarik yang ditonjolkan di awal ketika merintis sosok NU dalam kancah isu HIV adalah menonjol sosok *leadership*. Informan AG menyampaikan:

“Waktu itu seorang figur penting, *leadership* itu penting banget. Pak Syahrizal itu menjawab setelah banyak orang bertanya dan dia cukup ga emosional. Dia tenang menjelaskan, hampir semua seperti apa yang saya omongkan. NU itu memang organisasi keagamaan tapi dia cerita tentang beberapa pengalaman sebagai ketua LKNU dan seorang epidemiologis dan ngajar di UI.”

Unsur ke-tokoh-an serta ahli di bidang medis dan kesehatan masyarakat coba ditonjolkan oleh LKNU dalam proses awal membangun legitimasi organisasi. Sebagai tambahan, peneliti menemukan juga, salah satu langkah yang dilakukan untuk membangun legitimasi program NU, adalah pembuatan sebuah novel “Surga untuk ODHA” yang ditulis oleh kader NU di Jawa Tengah. Novel menceritakan secara rinci mengenai hasil Bahtsul Masa’il (BM) dan juga keseharian warga NU di daerah yang selalu menyandarkan pesan moral kepada bimbingan para kyai.

Manajemen Pengetahuan

Merespon dinamika yang dihadapi oleh PRNU dalam mengelola program dan manajemen. Perlu disikapi secara substansial baik secara teknis dan manajemen. Tidak dipungkiri upaya mengembangkan solusi yang tepat di lembaga menjadi penting diperhatikan. Siapa yang paling banyak menjadi rujukan dalam situasi dan dinamika apapun cukup signifikan untuk dipaparkan dalam anatomi NU. Cara melihatnya juga tidak terpaku pada aspek PRNU namun perlu melihat secara lengkap serta menyeluruh. Peran NU sebagai pelaksana program HIV menjadi isu yang strategis, karena GF memiliki alasan NU dianggap mampu mengubah opini positif pada isu HIV. Pendapat disampaikan oleh AS

staf program yang bertanggung pada bidang pencegahan transmisi seksual.

“Saya pikir gini NU dianggap sebelumnya berhasil dalam isu mengubah opini, dulu opininya KB adalah haram karena NU terlibat menjadi ada dukungan. TB (tuberkolosis) dulu opininya penyakit yang menakutkan, dijauhi masyarakat, karena NU terlibat orang tidak takut lagi dengan TB, kusta juga begitu. Nah saya pikir kemampuan NU terlibat dan merubah opini masyarakat luas inilah yang menjadi daya tarik GF karena di HIV itu kan ada isu stigma dan diskriminasi yang cukup kuat pada populasi kunci dan HIV.”

Informan berinisial BW menyampaikan pengalaman dalam program pengurangan dampak buruk napza suntik yang dibahas di sesi Bahtsul Masa’il (BM) sebuah diskusi para kyai:

“Di BM ada yang bahkan jawaban kyai itu 180 derajat berubah soal layanan alat suntik steril (LASS). Bagi Kyai yang belum mendapat penjelasan lengkap tentang LASS ini, jawabannya kyai, ini haram tidak boleh dilanjutkan. Namun berubah ketika dijelaskan oleh dr Syahrizal tentang situasi yang terjadi”.

Dalam menjalankan program PRNU memiliki buku pedoman yang digunakan untuk menjalankan roda lembaga secara tepat dengan kaidah yang telah diatur. Buku pedoman penting dalam pelaksanaan program karena akan membantu untuk memberi petunjuk kepada para pelaksan program yang ada di bawah PRNU. Informan yang bertanggung jawab kepada program AS menjelaskan:

“di Ansor (Gerakan Pemuda Anshor/GP Ansor) itu masalah-masalah yang muncul sebetulnya yang dominan bukan yang nilai-nilai, tapi malah yang muncul adalah bagaimana dia tidak bisa menjangkau (menjangkau kelompok kunci). Kalau masalah bergaul dengan waria, orang kyainya Gus Dur juga bergaul, dia sudah paham yang begitu-begitu. “

Namun, dalam praktiknya juga tidak mudah karena adanya petunjuk teknis (SOP/standar pelaksana), justru membikin kaku pelaksanaan program. Tambahan Informasi dari informan menyatakan:

“SOPnya itu juga baik, tapi ketika implementasinya itu yang bingung jadi misalnya kita di SOP harus menyampaikan harus

menyampaikan 5 kondom sementara mbak WPS (wanita penjaja seks) hanya mau terima 3, ini kan juga jadi....ini saya udah bekerja mati-matian, nerangain berbusa-busa sementara dia hanya mau nerima 3, terus kerjaan saya ga dihitung”.

Peran Kyai dalam Program

Diskusi dan wawancara dengan staf di PRNU serta LKNU, peneliti mendapati bahwa pengesahan terdapat program HIV dalam Bahtsul Masa'il (BM) melalui persetujuan para kyai adalah sangat penting. Para kyai selain berasal dari struktur PBNU yaitu *Syuriah* (pimpinan tertinggi) dan Tanfidzah (pelaksana), namun juga kyai yang memegang pondok pesantren. Namun demikian dalam tradisi NU bisa ditemui bahwa terdapat kyai yang masih belum mendukung terhadap program HIV. Salah seorang informan AS yang merupakan koordinator program menyampaikan:

“Ada istilah di NU begini, kalau di NU ga bisa beli borongan... jadi belum tentu satu orang setuju yang lain setuju gitu, kalau satu orang bilang iya, berarti semua iya...belum tentu.”

Hal ini cukup disadari oleh para pengelola program di PRNU sehingga dianggap sebagai suatu proses dalam membangun program HIV dan tidak menimbulkan patah semangat.

Isu sensitif yang melekat pada struktur program berupa nilai dan norma, tidak mudah berinteraksi dengan nilai dan norma anggota organisasi pelaksana program. Dalam program HIV/AIDS, isu kondom dan populasi kunci merupakan isu sensitif. Isu kondom dan populasi kunci telah menimbulkan kontestasi antara nilai dan norma yang ada dalam anggota dengan nilai yang melekat pada program. Kontestasi nilai dan norma berlangsung sepanjang program serta melekat dalam upaya LKNU membangun legitimasi organisasi dan pelaksanaan manajemen pengetahuan.

Peneliti melihat bahwa terjadi kebimbangan anggota organisasi dalam berinteraksi dengan isu-isu sensitif program HIV. Anggota organisasi tidak mudah berinteraksi dengan nilai dan norma yang dimiliki program HIV. Namun, ketika organisasi memiliki landasan yang berkaitan dengan aspek kesehatan dalam visi dan misi, maka memudahkan anggota organisasi untuk mengakomodasi interaksi nilai dan norma yang dihadapi. Didukung juga dengan pengaruh *opinion leader* di NU yakni peran dari kyai. *Opinion leader* mampu menjadi

rujukan informasi dan tempat bertanya terhadap isu-isu sensitif yang dimiliki program HIV, seperti isu kondom dan populasi kunci. Peran dari kyai sangat penting karena warga NU tidak serta merta mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi NU formal (LKNU dan PBNU). Sebagian warga NU memiliki kepatuhan terhadap kyai kultural yang memegang pondok pesantren di wilayah. Kyai kultural merupakan kyai yang tidak menjabat posisi di PBNU, pengurus cabang atau wilayah, namun tetap memiliki pengaruh kuat terhadap jamaahnya.

Tantangan Membangun Legitimasi

Pada tahun pertama dan kedua program berjalan walaupun NU mampu membangun legitimasi yang ada namun disadari NU selama ini hanya berkecimpung dalam komunitas agama dan sosial kemasyarakatan, sehingga tidak spesifik pada kaitannya dengan HIV. Para anggotanya terlibat dalam berbagai kegiatan namun tidak intensif, menimbulkan kurang kepercayaan berbagai lembaga yang menjadi mitra kerja penanggulangan HIV. Namun demikian upaya NU melalui LKNU untuk menghadirkan narasumber dalam forum-forum dialog yang memiliki latar belakang kesehatan masyarakat dan ahli di bidang HIV, merupakan salah satu cara untuk membangun legitimasi organisasi.

LKNU sebagai organisasi sosial keagamaan bisa menjawab masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Masalah-masalah sosial seperti tingkat penularan HIV yang tinggi di kalangan ibu rumah tangga, pemberian kondom pada perilaku berisiko, pasangan nikah yang salah satunya adalah ODHA, layanan jarum suntik steril, dan posisi warga NU dalam konteks penanggulangan HIV. Selain tercantum dalam visi dan misi yang dimiliki oleh LKNU, upaya melaksanakan forum BM untuk menjawab permasalahan sosial kesehatan yang dimiliki masyarakat hal tersebut mampu menjawab legitimasi normatif. Para kyai di NU mampu melakukan pergeseran pijakan hukum berdasar rujukan informasi yang memadai untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Eksistensi Organisasi Melalui Manajemen Pengetahuan yang Efektif

Program penanggulangan HIV yang dikelola oleh NU memiliki kekhasannya sendiri. Populasi yang dijangkau yaitu disebut populasi

kunci, meliputi waria, wanita penjaja seks (WPS), laki-laki pelanggan seks atau juga di sebut lelaki berisiko tinggi (LBT), laki-laki seks dengan laki (LSL), serta pengguna napza suntik (penasun). Pendekatan yang dilakukan pada kelompok populasi kunci untuk mencegah penularan dilakukan dengan tindakan-tindakan praktis seperti pemberian informasi komunikasi, informasi dan edukasi/KIE, pemberian alat pencegah perilaku seks berisiko yaitu kondom, pemberian jarum suntik steril kepada penasun, rujukan kelayanan rehabilitasi sosial untuk penasun serta rujukan ke layanan testing HIV.

Dalam implementasi tidak jarang penolakan terhadap strategi program HIV karena sangat erat kaitannya dengan isu sensitif. Isu sensitif yang ada seperti pemberian kondom dianggap sebagai pembiaran tindakan perzinahan atau melegalkan tindakan yang dilarang oleh agama. Pemberian jarum suntik steril kepada penasun dianggap sebagai legalisasi napza di masyarakat. Selanjutnya ketika melakukan penjangkauan atau outreach para petugas lapangan harus pula masuk ke area “merah” seperti lokalisasi dan tempat-tempat hiburan malam. Hasil BM yang telah dikeluarkan oleh LKNU merupakan jawaban dari upaya lembaga sosial keagamaan menjelaskan fenomena kesehatan dan sosial berlandaskan pijakan hukum agama (*fiqih*) berdasar putusan para kyai. Sehingga menjadi kuat dan strategis langkah yang diambil oleh LKNU.

Penutup

Kesimpulan dalam penelitian terbagi menjadi dua hal, yaitu aspek internal dan eksternal. Kesimpulan dalam aspek internal, adalah *pertama*, peran kyai dalam program memiliki posisi yang fundamental. Peran kyai penting dalam kegiatan yang lakukan oleh LKNU karena kyai merupakan *opinion leader*. Kyai merupakan posisi yang selalu menjadi rujukan utama bagi nahdiyyin.

Kedua, peran *opinion leader* dalam sebuah bidang program sangat membantu dalam keefektifan komunikasi program, bila dihubungkan dengan konsep manajemen pengetahuan peran *opinion leader* mampu menjadi salah satu saluran komunikasi penting untuk pengetahuan baru yang diproduksi dalam manajemen pengetahuan, seperti hasil BM dan juga buku-buku pedoman program HIV perspektif NU.

Ketiga, adalah terjadinya interaksi nilai, norma individu, dan organisasi dengan *body of knowledge* program HIV. Kontestasi dengan nilai dan norma program tetap muncul walaupun isu HIV bukan sesuatu hal baru bagi NU dan LKNU. Kontestasi nilai dan norma tersebut tidak

menimbulkan benturan terlalu keras karena ternyata NU dan LKNU memiliki landasan kuat dari visi dan misi organisasi. Prinsip nilai yang melandasi berdirinya NU juga menunjukkan bahwa sikap moderat, toleran, harmoni, dan konsisten merupakan implikasi dari paham *Ahli Sunnah Waljamaah* (ASWAJA) yang menjadi anutan kyai dan warga Nahdhiyin.

Keempat, manajemen pengetahuan telah dilakukan oleh NU dalam merespon program HIV. Bentuk dari manajemen pengetahuan antara lain terdapatnya buku-buku pedoman program, monitoring/evaluasi, dan manajemen keuangan membuat program yang dijalankan bisa berlangsung efektif. Bentuk manajemen pengetahuan lain, yang dilakukan NU salah satunya adalah dengan melakukan forum BM.

Kesimpulan pada aspek eskternal, *pertama* adalah kemitraan dengan berbagai organisasi LSM peduli HIV yang telah memiliki keahlian dalam penjangkauan populasi kunci dan dukungan psiko-sosial ODHA, merupakan upaya strategis untuk mencapai tujuan program HIV. Program yang dijalankan berbentuk layanan, seperti penjangkauan kelompok populasi kunci (waria, LSL, penjaja seks, pelanggan seks, serta LBT), rujukan tes HIV, dukungan psiko-sosial ODHA, pusat informasi kesehatan masyarakat (PIKM), dan BM dengan para kyai.

Kedua, membangun legitimasi adalah bagian utama dari pelaksanaan program, merupakan sebuah proses yang berlangsung terus-menerus. Bersandar pada teori institusi, legitimasi dibangun NU melalui berbagai sumber dari aspek lingkungan. Upaya NU menjawab problema sosial dan kesehatan di masyarakat memposisikan NU untuk mendapatkan legitimasi lingkungan. Penggunaan simbol-simbol yang sesuai dengan program HIV juga memposisikan NU mendapat legitimasi simbol.

Interaksi nilai dan norma seperti isu kondom, pemberian jarum suntik steril, isu lokalisasi, populasi kunci, dan ODHA akan terus berlangsung sepanjang program berjalan. Oleh karenanya, LKNU perlu mendiskusikan hasil-hasil BM dalam organisasi NU, warga NU, maupun LSM mitra NU. Hasil BM ini juga merupakan jawaban untuk isu-isu sensitif dan bertujuan untuk mengurangi stigma/diskriminasi di program HIV/AIDS. Kegiatan mendiskusikan hasil-hasil BM bisa dilakukan dalam wadah seperti pelatihan dan pertemuan internal pada tingkat organisasi NU, *Principle Recipient* (PR), *Sub Recipient* (SR), *Sub-sub Recipient* (SSR), Pengurus Wilayah NU (PWNU), Pengurus Cabang NU (PCNU), dan jamaah pengajian warga NU secara rutin.

Serta mengundang kyai yang merupakan sosok *opinion leader* untuk menjadi narasumber hasil BM yang memiliki pengaruh dan keyakinan pada jamaahnya masing-masing.

Terkait dengan upaya memperkuat gerakan sosial dalam penanggulangan HIV/AIDS. Kemitraan dengan LSM HIV/AIDS dan organisasi internal NU tetap perlu dilakukan. Namun demikian, pihak LKNU perlu berkolaborasi dengan LSM yang memiliki kapasitas advokasi dan mobilisasi sosial sehingga kegiatan LKNU tidak hanya pada pendekatan layanan kesehatan HIV namun pendekatan komunitas melalui strategi advokasi dan mobilisasi sosial untuk mencapai pemberdayaan kesehatan bagi komunitas populasi kunci.

Strategi pengorganisasian melalui manajemen pengetahuan juga harus diterapkan oleh mitra LKNU yang tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten. Pengembangan dan pembuatan buku-buku pedoman mengenai sistem monitoring/evaluasi sistem keuangan, dan strategi program yang sudah dijalankan di tingkat pusat oleh LKNU harus ditelaah dan dijalankan secara baik untuk organisasi mitra LKNU dalam program HIV/AIDS. Pelatihan di tingkat nasional tidak akan memadai secara waktu dan materi sehingga perlu dibentuk tim bimbingan teknis dan manajemen LKNU meliputi aspek program, monitoring/evaluasi, manajemen keuangan yang terdiri dari staf LKNU, PRNU, organisasi NU LSM mitra NU, dan kyai pada tingkat regional dan provinsi untuk merespon pelaksanaan manajemen pengetahuan yang sistematis dan berdampak pada efektifitas program melalui berbagai pelatihan dan pengayaan berkala namun intensif di tingkat provinsi dan kabupaten kota. (*)

Daftar Bacaan

- Davenport, Thomas, H. dan Lawrence Prusak. (2005). *ACM: Ubiquity - Working Knowledge: How Organizations Manage what They Know*. IT Magazine & Forum.
- Evan, John H. (1997). *Multi-organizational Field and Social Movement Organization Frame Content: The Religious Pro-Choice movement*. Sociological Inquiry.
- Gaffar Karim, Abdul. (1995). *Metamorfosis NU dan politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LKIS.
- Green, Gary Paul & Anna Haines. (2002). *Asset Building & Community Development*. Sage Publications, Inc.

- Hidayatullah, Syarif. (2010). *Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ida, Laode.(1996). *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jackson, O Matthew.(2008). *Social and Economic Network*. Princeton University Press.
- Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN). (2010). *Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI).(2012). *Pedoman Layanan Komprehensif HIV-IMS Berkesinambungan*, Kemenkes RI, Jakarta.
- Lembaga Kesehatan Nahdatul Ulama (LKNU).(2010). *Pedoman Implementasi Program NU (PIP)*. Jakarta.
- LKNU.(2013). *Panduan Penanggulangan AIDS Perspektif Nahdlatul Ulama*, PPLKNU. Jakarta.
- LPKNU.(2009). *Sekilas tentang LPK NU, Laporan Kegiatan Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPKNU), periode 2005-2009*, PP LPKNU. Jakarta
- Lister,Sarah.(2003). *NGO Legitimacy: Technical Issue or Social Construct?, Critique of Antropology*.
- Portes, Alejandro.(2006). *Institutions and Development: A Conceptual Reanalysis*, *Population and Development Review* 32 (2).
- Ridwan.(2004). *Paradigma Politik NU, Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shams Madyan, Ahmad. 2009. *AIDS Dalam Islam, Krisis Moral atau Krisis Kemanusiaan*. Jakarta: Mizan.
- UNAIDS. (2013). *Global Report: Report on the global AIDS epidemic 2013*.
- World Health Organization (WHO).(2012). *HIV-AIDS in the South-East Asia Region, Progress Toward MDGs 6A, 2012*.